KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Mundurnya ditolak MKD,Sara Gerindra diaktifkan lagi jadi Anggota DPR
Tanggal : Sabtu, 01 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 6

Mundurnya Ditolak MKD

Sara Gerindra Diaktifkan Lagi Jadi Anggota DPR

MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menolak permohonan pengunduran diri Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Keputusan ini membuat Sara diaktifkan kembali sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra.

Penetapan status keanggotaan Sara, sapaan karib Rahayu Saraswati, diputuskan dalam rapat tertutup MKD yang digelar Rabu (29/10/2025). Rapat itu merupakan tindak lanjut surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-043/B/MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 perihal surat keanggotaan Sara.

Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam menegaskan, keputusan tersebut diambil sesuai ketentuan yang berlaku. Ia memastikan, proses berjalan independen dan

BERSAMBUNG KE HAL 6

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Ada Petisi Dari Ribuan Orang Tolak Sara Mundur

Sara Gerindra

... DARI HALAMAN 1

sesuai prinsip penegakan etik.

"MKD DPR memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai anggota DPR periode 2024-2029," kata Nazaruddin, Kamis (30/10/2025).

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap sejumlah pertimbangan yang membuat pengunduran diri Sara ditolak. Ia menegaskan, Sara tak pernah dilaporkan ke MKD maupun ke partai.

Selain itu, ada kader Gerindra yang mengajukan permohonan agar pengunduran diri Sara ditolak. Permohonan itu kemudian diperiksa Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Setelah diperiksa, tuduhan terhadap Sara terbukti tak berdasar.

Pertama, kasus yang dituduhkan nggak ada laporan. "Kedua, yang berkembang di publik itu konten yang sudah lama dan diedit hingga artinya tidak sama dengan yang disampaikan," jelasnya.

Dasco juga menyebut, ada tekanan tertentu yang membuat Sara menyatakan pengunduran diri secara lisan. Padahal secara administratif harus ada surat resmi. Selain itu, muncul pula petisi dari ribuan pendukung Sara di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III, agar ia tidak diberhentikan.

"Ada petisi dari berapa puluh ribu pendukungnya Sara ke Mahkamah Partai, 30 ribu kalau nggak salah, atau 15 ribuan," ungkap Ketua Harian Partai Gerindra ini.

Mahkamah Partai Gerindra kemudian menyimpulkan pengunduran diri Sara tidak memenuhi syarat hukum, dan hasilnya diserahkan ke MKD.

Dasco berharap kasus ini menjadi pelajaran soal bahaya konten digital yang dimanipulasi. "Bahaya konten lama yang kemudian diedit-edit sehingga artinya sangat jauh berbeda," imbaunya.

Diketahui, Sara mengumumkan pengunduran diri melalui Instagram pada 10 September 2025. Ia menyebut, keputusannya berkaitan dengan pernyataannya dalam podcast atau siniar Antara TV pada 28 Februari 2025 yang dinilai menyinggung masyarakat, terutama pekerja dan pencari kerja.

"Saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya," kata putri Hashim Djojohadikusumo tersebut.

Sara yang dikontak Rakyat Merdeka melalui pesan, tak menjawab perihal ini. Hanya saja, berdasarkan status WhatsApp Sara Kamis (30/10/2025), keponakan Prabowo ini sempat mengunggah tangkapan layar komentar negatif netizen di kolom komentar sebuah portal berita, menanggapi keputusan MKD.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi menyatakan, pihaknya akan mengaktifkan kembali Sara sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

"Kami akan mengaktifkan lagi Sara sebagai anggota DPR setelah sebelumnya dinonaktifkan," kata Bambang, Jumat (31/10/2025).

Bambang menambahkan, Fraksi Partai Gerindra tunduk pada aturan yang berlaku di DPR RI, termasuk status keanggotaan kader di parlemen. "Kami mengikuti mekanisme internal DPR," sebut Bambang.

Peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro menilai, keputusan MKD DPR menolak pengunduran diri Sara sudah tepat. Sebab, dia menilai, tak ada hal yang dilanggar Sara secara etik.

"Yang kemarin itu konten lama di sebuah podcast, kemudian dilepaskan di luar konteks. Sehingga memunculkan pemahaman keliru publik," kata Bawono dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Ditambahkan Bawono, MKD menilai aspirasi dari konstituen di Dapil Sara, juga menjadi poin pertimbangan. Rakyat yang merasa diwakili, nyatanya tetap ingin Sara mempejuangkan aspirasi mereka di Senayan.

"Mereka merasa akan kehilangan seorang legislator perempuan dengan kapasitas baik, mumpuni dalam memahami isu sosial dan khususnya isy perempuan. Maka sebuah kerugian bagi publik di dapil, dan secara luas, serta bagi DPR RI," jelasnya.

Bawono menambahkan, keputusan MKD DPR tak bisa diintervensi oleh eksekutif. Bahkan oleh Presiden. Artinya, meski Sara berstatus sebagai keponakan Presiden, status ini tak menjadi faktor penentu terhadap keputusan MKD. ■ FAQ/BYU